



Center for Social Statistics Studies

Institute of Statistics

PUSAT KAJIAN STATISTIK SOSIAL

WORKING PAPER SERIES

No: 1 /Desember 2017

**MENGUKUR REVOLUSI MENTAL DI INDONESIA
MELALUI INDEKS REVOLUSI MENTAL**

Oleh:

**Mohammad Dokhi, Novia Budi Parwanto
Tiodora Hadumaon Siagian, Ernawati Pasaribu
dan Sukim**

**SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK
JI. OTTO ISKANDARDINATA NO. 64 C
JAKARTA TIMUR**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Lampiran	iv
Sinopsis	v
Abstrak	1
Latar Belakang	1
Konsep dan Definisi Revolusi Mental	3
Sumber Data dan Metodologi	5
Metode Analisis	6
Hasil dan Pembahasan	12
Kesimpulan dan Saran	17
Daftar Pustaka	18
Lampiran	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dimensi, sub-dimensi, variabel, indikator, dan sumber data Indeks Revolusi Mental	6
Tabel 2. Indikator dan Arahnya	7
Tabel 3. Pairwise comparison matrix menggunakan Skala Pengukuran Saaty (Saaty, 2008)	10
Tabel 4. Nilai Dimensi Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong menurut provinsi	12
Tabel 5. Ringkasan nilai statistik untuk masing-masing dimensi revolusi mental	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram alir penghitungan dan pemetaan nilai Indeks Revolusi Mental	11
Gambar 2. Nilai Indeks Revolusi Mental menurut provinsi (%)	15
Gambar 3. Peta nilai Indeks Revolusi Mental menurut provinsi (%)	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai Indeks Dimensi Integritas menurut provinsi (%)	19
Lampiran 2. Nilai Indeks Dimensi Etos Kerja menurut provinsi (%)	20
Lampiran 3. Nilai Indeks Dimensi Gotong Royong menurut provinsi (%)	21

SINOPSIS PENELITIAN

MENGUKUR REVOLUSI MENTAL DI INDONESIA MELALUI INDEKS REVOLUSI MENTAL

Oleh:

Mohammad Dokhi

Novia Budi Parwanto

Tiodora Hadumaon Siagian

Ernawati Pasaribu

dan

Sukim

- Signifikansi penelitian : Disadari Indonesia menghadapi tiga permasalahan pokok bangsa yaitu kewibawaan negara yang merosot, daya saing yang rendah dan adanya kecenderungan peningkatan intoleransi yang dapat mengganggu persatuan bangsa dan mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu revolusi karakter bangsa menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Namun demikian revolusi karakter bangsa tidak akan berjalan optimal tanpa diawali dengan inisiatif melakukan revolusi mental. Melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dicanangkan lima program gerakan nasional revolusi mental. Oleh karenanya suatu penelitian untuk mengukur pencapaian revolusi mental dipandang penting dilakukan sehingga dapat dijadikan acuan dasar (*benchmark*) dalam evaluasi dan monitoring pada tahun-tahun selanjutnya.
- Tujuan penelitian : Untuk melakukan pengukuran revolusi mental di Indonesia melalui Indeks Revolusi Mental
- Cakupan : Nasional
- Unit analisis : Provinsi
- Data yang digunakan : Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2015 serta Potensi Desa 2014
- Manfaat hasil penelitian : Memberikan informasi tentang besaran revolusi mental pada level provinsi yang dapat dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat
- Diseminasi hasil penelitian : Belum didiseminasikan namun direncanakan akan di seminarkan di STIS awal tahun 2018

MENGUKUR REVOLUSI MENTAL DI INDONESIA MELALUI INDEKS REVOLUSI MENTAL

Oleh:

Mohammad Dokhi, Novia Budi Parwanto,
Tiodora Hadumaon Siagian, Ernawati Pasaribu dan Sukim

Abstrak:

Revolusi mental diharapkan dapat membantu mengatasi tiga masalah pokok bangsa Indonesia, yaitu merosotnya kewibawaan negara, menurunnya daya saing, dan meningkatnya intoleransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat revolusi mental melalui berbagai dimensi serta indikator terhadap provinsi-provinsi di Indonesia. Pengukuran beberapa dimensi dari revolusi mental sangat diperlukan untuk memahami komponennya, menetapkan tolok ukur keberhasilan, serta mengkatalisis penyempurnaannya. Studi ini menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menghitung Indeks Revolusi Mental (IRM), baik dari sisi penetapan dan pemilihan dimensi serta variabel dan indikator, data yang digunakan, dan metode penghitungannya yaitu berdasarkan model *analytical hierarchy process* (AHP). Nilai IRM yang diperoleh dapat digunakan untuk membandingkan provinsi-provinsi dalam berbagai aspek dan dimensi yang berkaitan dengan revolusi mental, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya identifikasi area kekuatan atau kelemahan spesifik di tingkat provinsi. Berdasarkan nilai IRM yang dihasilkan dalam studi ini, diharapkan dapat membantu memecahkan tiga masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Revolusi mental, Kerentanan sosial, SEM-PLS, Indonesia

1. Latar Belakang

Presiden Joko Widodo dalam masa kepemimpinannya melakukan seruan untuk dilaksanakannya sebuah “revolusi mental” kepada seluruh rakyat Indonesia dan institusi dalam rangka untuk mengatasi merosotnya wibawa negara, lemahnya sendi perekonomian bangsa, dan intoleransi dan krisis kepribadian bangsa yang mencakup konflik terkait suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA). Ketiga permasalahan ini merupakan tiga masalah pokok yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Melalui seruan ini, yang diartikulasikan sebagai Nawa Cita, atau Sembilan Prioritas Pembangunan Indonesia, Presiden menyadari bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia tergantung dari kemampuan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku untuk memperbaiki kelemahan struktural dalam perekonomian.

Di samping itu, dalam berbagai survei berskala internasional seringkali angka Indonesia cenderung rendah dalam aspek baik, namun cenderung tinggi angkanya dalam aspek buruk. Sebagai contoh dalam aspek tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara dapat diukur melalui Indeks Kemajuan Sosial (*Social Progress Index* atau SPI) (Porter, Stern & Green, 2016). SPI dianggap lebih komprehensif dibanding indeks-indeks kesejahteraan yang telah ada sebelumnya. Kemajuan sosial didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, untuk membangun pondasi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidupnya serta menciptakan kesempatan bagi tiap individu agar mampu mencapai tingkat potensi tertingginya. Berdasar angka SPI 2016, Indonesia menempati peringkat ke 88 dari 133 negara di dunia dengan skor 62,27. Sementara negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia berada pada peringkat ke 50 dengan skor 70,08 dan Thailand berada pada peringkat 61 dengan skor 67,43.

Pada aspek buruk, suatu negara dapat dilihat dari tingkat korupsinya. Berdasar Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2016 yang dikeluarkan Badan Anti Korupsi Dunia (*Transparency Internasional*), Indonesia menempati peringkat ke 90 dari 176 negara dengan skor 37. Tingginya angka IPK ini menunjukkan perilaku korupsi masih tinggi pada aspek publik, administrasi pemerintahan dan politik di Indonesia. Lebih jauh kondisi ini dianggap cukup memalukan karena angka IPK negara-negara ASEAN lainnya tidak setinggi Indonesia misalnya Singapura berada di peringkat ke 7 dengan skor 87, Brunei Darusalam di peringkat ke 41 dengan skor 58 dan Malaysia di peringkat ke 55 dengan skor 49. Angka IPK memiliki skala 0-100, dimana 0 menunjukkan tingkat korupsi terburuk dan 100 menunjukkan tingkat korupsi paling bersih dari korupsi. Ahmed Riahi-Belkaoui (2003) menyatakan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak di suatu negara berbanding lurus dengan tingkat pengendalian korupsi di negara tersebut. Tingginya angka IPK Indonesia ini mungkin dapat menyebabkan buruknya citra pajak di mata masyarakat. Akibatnya masyarakat mungkin saja cenderung beranggapan tidak amanah dalam menyalurkan uang hasil pajak dalam pembiayaan pembangunan. Kemungkinan terburuknya adalah akan banyak pengusaha dan masyarakat yang lari dari tanggung jawab membayar pajak.

Selain itu dari masyarakat Indonesia sendiri juga merasa resah melihat perilaku, sikap serta mentalitas kita yang saling serobot di jalan raya, tak mau antre, kurang penghargaan

terhadap orang lain. Serangkaian FGD (kelompok diskusi terfokus) di Jakarta, Aceh, dan Papua yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Revolusi Mental Rumah Transisi juga menggambarkan keresahan masyarakat tentang karakter kita sebagai bangsa.

Untuk memperbaiki serta membangun karakter bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Instruksi Presiden ini bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi salah satu agenda strategis pembangunan dalam mengatasi ketiga masalah pokok Bangsa Indonesia.

Berdasarkan diskusi di atas, studi ini bertujuan untuk mengukur revolusi mental di Indonesia pada level provinsi melalui pembentukan Indeks Revolusi Mental atau disingkat IRM. Data yang digunakan sampai saat ini masih terbatas pada data-data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data modal sosial yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Potensi Desa (Podes) 2014. Pengukuran IRM dianggap penting dilakukan sehingga dapat dijadikan acuan dasar (*benchmark*) serta dapat dimonitor perkembangannya pada tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, IRM dapat digunakan untuk menunjukkan adanya variasi dalam pencapaian revolusi mental antar provinsi di Indonesia sehingga dapat dijadikan ukuran bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyusun program dalam rangka gerakan revolusi mental.

2. Konsep dan Definisi Revolusi Mental

Untuk memperbaiki serta membangun karakter bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memuat lima program gerakan nasional revolusi mental yang meliputi:

1. Gerakan Indonesia Melayani
2. Gerakan Indonesia Bersih
3. Gerakan Indonesia Tertib

4. Gerakan Indonesia Mandiri
5. Gerakan Indonesia Bersatu

Secara konsep dan definisi, terdapat beberapa pendapat tentang revolusi mental. Menurut Presiden Soekarno, “Revolusi Mental merupakan satu gerakan untuk menggembleg manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala” (Soekarno, 1957). Presiden Joko Widodo juga berpendapat bahwa “Untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa, Kita perlu melakukan Revolusi Mental” (Joko Widodo, 2016). Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga menyatakan bahwa Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat (pemerintah & rakyat) dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi (Kemenko PMK, 2017). Revolusi Mental diharapkan dapat mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, yakni “*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, maka terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan Revolusi Mental. Tujuan dari Revolusi Mental adalah:

1. Mengubah Cara Pandang, Pikir dan sikap, perilaku dan cara kerja;
2. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik; dan
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental tentu diperlukan adanya nilai-nilai inti sebagai landasan pelaksanaannya. Berdasarkan program revolusi mental yang dibuat oleh Kemenko PMK, terdapat tiga nilai revolusi mental, yaitu: Integritas, yang mencakup nilai-nilai kejujuran, dipercaya, berkarakter, dan tanggung jawab; Etos Kerja, yang

mencakup nilai-nilai etos kerja, daya saing, inovatif dan produktif; serta Gotong Royong, yang mencakup nilai-nilai kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kemudian, strategi internalisasi dari ketiga nilai revolusi mental dilakukan melalui berbagai jalur, diantaranya: jalur birokrasi, jalur pendidikan, jalur swasta, dan jalur kelompok masyarakat.

Penjelasan dari masing-masing nilai revolusi mental di atas adalah sebagai berikut:

1. **INTEGRITAS**, dengan Sub Nilai:

- a. Kewargaan, sebagai contoh perilaku yaitu bersih, antri, hak disable, hak pejalan kaki, aman berkendara
- b. Dapat dipercaya, sebagai contoh perilaku yaitu anti memberi dan menerima suap

2. **ETOS KERJA**, dengan Sub Nilai :

- a. Profesional, yaitu memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; sebagai contoh perilaku yaitu cepat tanggap, tepat waktu, tidak menunda pekerjaan
- b. Mandiri, memiliki arti yaitu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain; sebagai contoh perilaku yaitu cinta produk Indonesia
- c. Kreatif, memiliki daya cipta/kemampuan untuk menciptakan; sebagai contoh perilaku yaitu melakukan inovasi, anti mencontek, life long learning

3. **GOTONG ROYONG**, dengan Sub Nilai:

- a. Saling menghargai, sebagai contoh perilaku yaitu sopan santun, menerima perbedaan, anti kekerasan, anti diskriminasi, kasih sayang
- b. Gotong Royong, sebagai contoh perilaku yaitu tolong menolong, kerjasama, kerelawanan

3. Sumber Data dan Metodologi

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari BPS berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Potensi Desa (Podes) 2014 dengan cakupan seluruh Indonesia. Dalam penelitian ini penghitungan IRM dilakukan untuk seluruh provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak 34 provinsi. Ketiga nilai revolusi mental seperti dijelaskan pada bagian 2 selanjutnya akan menjadi dimensi dari penghitungan

IRM, sedangkan beberapa sub-nilainya akan menjadi sub-dimensi. Kemudian, untuk pengukuran dari sub-dimensi tersebut dilakukan berdasarkan variabel dan indikator yang sesuai dan ketersediaan data.

Dimensi, sub-dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini beserta penjelasan dan sumber datanya adalah seperti disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Dimensi, sub-dimensi, variabel, indikator, dan sumber data Indeks Revolusi Mental

Dimensi	Sub-dimensi	Variabel	Indikator	Sumber Data
Integritas	Kewargaan	Mengetahui hak individu sebagai warga negara	Persentase yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Susenas MSBP
		Mengetahui kewajiban individu sebagai warga negara	Rata-rata lamanya belajar dalam sehari	Susenas MSBP
Etos Kerja	Profesional	Meningkatnya produktivitas kerja (Pendapatan/jam kerja)	Rata-rata jumlah jam kerja pada pekerjaan utama selama seminggu yang lalu	Sakernas
			Rata-rata pendapatan yang diterima dari pekerjaan utama selama sebulan yang lalu	Sakernas
	Mandiri	Meningkatnya tenaga-tenaga entrepreneurship	Persentase tenaga kerja dengan status berusaha sendiri atau dibantu buruh tidak tetap	Sakernas
			Persentase tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	Sakernas
Gotong Royong	Saling menghargai	Menurunnya persentase perkelahian di suatu wilayah	Persentase desa yang terdapat perkelahian massal	Podes
	Gotong Royong	Meningkatnya persentase penduduk yang mengikuti kegiatan gotong royong	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan gotong royong	Susenas MSBP
			Persentase desa yang masih memiliki kebiasaan gotong royong	Podes

4. Metode Analisis

Pengukuran IRM dilakukan dengan menghitung indeks komposit yang nantinya dipakai untuk mengkategorikan provinsi menurut nilai IRM. Indeks komposit ini merupakan gabungan

beberapa sub dimensi atau sub indeks (Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong) menggunakan indikator/variabel terpilih sesuai Tabel 1. Mengingat setiap indikator memiliki skala pengukuran yang berbeda maka terlebih dahulu dilakukan normalisasi data untuk setiap provinsi. Ada beberapa metode normalisasi data misalnya metode ranking, standarisasi dengan Z-scores, Min-Max, skala kategori dan masih banyak lagi metode lainnya. Namun dalam penelitian ini proses normalisasi data menggunakan metode Min-Max.

Sebelum melakukan normalisasi data terlebih dahulu dilakukan penilaian indikator mana yang memiliki arah positif dan mana yang memiliki arah negatif terhadap nilai revolusi mental. Tabel 2 di bawah ini memberikan informasi tentang arah dari setiap indikator untuk masing-masing dimensi.

Tabel 2. Indikator dan Arahnya

Dimensi	Indikator	Arah
Integritas	Persentase yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) (I_1)	(+)
	Rata-rata lamanya belajar dalam sehari (I_2)	(+)
Etos Kerja	Rata-rata jumlah jam kerja pada pekerjaan utama selama seminggu yang lalu (EK_1)	(+)
	Rata-rata pendapatan yang diterima dari pekerjaan utama selama sebulan yang lalu (EK_2)	(+)
	Persentase tenaga kerja dengan status berusaha sendiri atau dibantu buruh tidak tetap (EK_3)	(+)
	Persentase tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (EK_4)	(+)
Gotong Royong	Persentase desa yang terdapat perkelahian massal (GR_1)	(-)
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan gotong royong (GR_2)	(+)
	Persentase desa yang masih memiliki kebiasaan gotong royong (GR_3)	(+)

Rumus normalisasi data untuk indikator yang memiliki arah positif adalah sebagai berikut:

$$Ind_{norm} = \frac{X_a - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \quad (1)$$

Sedangkan rumus normalisasi data untuk indikator yang memiliki arah negatif adalah sebagai berikut:

$$Ind_{norm} = \frac{X_{max} - X_a}{X_{max} - X_{min}} \quad (2)$$

dimana Ind_{norm} adalah nilai indikator yang sudah dinormalisasi, X_a adalah nilai indikator asli dan X_{max} serta X_{min} adalah nilai maksimum dan minimum dari indikator tersebut.

Setelah dilakukan proses normalisasi data, setiap Ind_{norm} diberi bobot menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk membentuk sub indeks-sub indeks. Metode AHP adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria (*Multi-Criteria Decision Making*) yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty, seorang ahli matematika pada tahun 1970-an dan terus disempurnakan sejak saat itu. Metode AHP merupakan alat pengambilan keputusan yang menguraikan suatu permasalahan kompleks ke dalam struktur hirarki dengan banyak tingkatan yang terdiri dari tujuan, kriteria dan alternatif. Metode ini sudah secara luas diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, industri, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan banyak bidang lainnya. Metode AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang ingin diteliti dimana di dalam struktur hirarki tersebut terdapat tujuan utama, kriteria-kriteria, sub kriteria dan alternatif-alternatif. Perbandingan pasangan digunakan untuk membnetuk hubungan di dalam struktur hirarki. Kemudian setelah nilai dari masing-masing dimensi untuk setiap provinsi diperoleh menggunakan metode AHP, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai IRM untuk masing-masing provinsi dengan menggunakan metode *equal weight* untuk setiap dimensi.

Proses hirarki analitis memberikan kerangka yang memungkinkan untuk membuat suatu keputusan yang efektif yang kompleks dengan cara menyederhanakan dan mempercepat proses pendukung keputusan (Saaty, 2008). Proses hirarki analitik pada dasarnya terdiri dari 3 tahap yaitu:

1. Dekomposisi
2. Penilaian komparasi (*Comparative judgement*) dan
3. Penentuan prioritas

Tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan di dalam mengaplikasikan metode AHP terdiri dari:

- a) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan
- b) Membuat struktur hirarki di mana dimulai dengan menetapkan tujuan umum, lalu kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin diranking.
- c) Membentuk matriks perbandingan berpasangan (*pair wise comparison matrix*) yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap indikator terhadap masing-masing kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan ini dilakukan secara subyektif oleh pembuat keputusan dengan cara menilai tingkat kepentingan suatu indikator dibanding indikator lainnya.
- d) Normalisasi data dengan cara membagi nilai setiap indikator di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
- e) Menghitung nilai eigen vektor dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi.
- f) Mengulangi langkah 3,4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki
- g) Mengitung nilai eigen vektor dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai eigen vektor ini adalah bobot setiap indikator gunanya adalah untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas indikator-indikator pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.
- h) Menguji konsistensi hirarki yaitu dengan cara melihat nilai CR (*Consistency ratio*). CR dianggap konsisten jika $< 0,10$

Pairwise comparison matrix untuk Integritas, Kode Etik, dan Gotong Royong menggunakan Skala Pengukuran Saaty (Saaty, 2008) dapat dilihat pada Tabel 3.

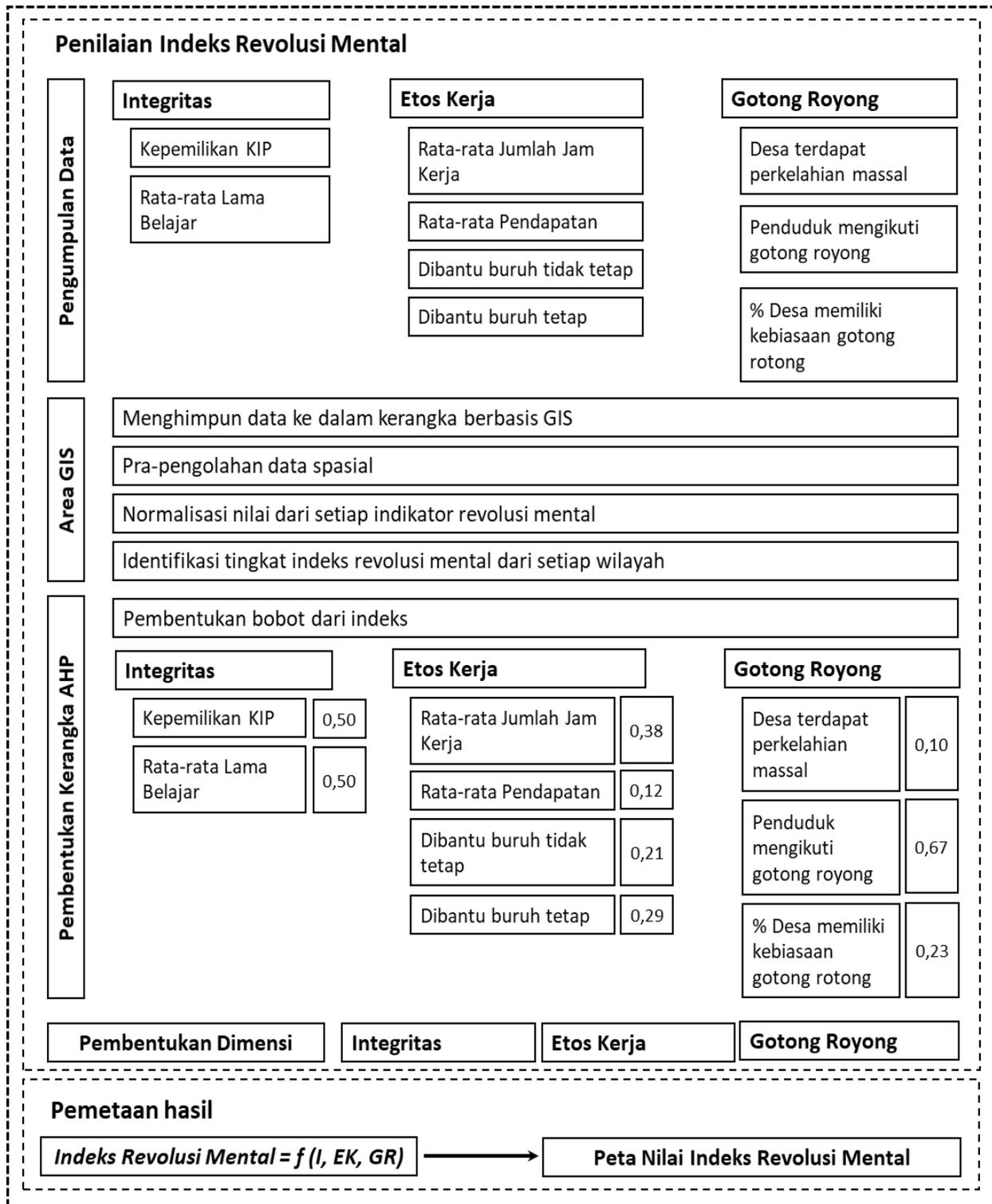
Tabel 3. *Pairwise comparison matrix* menggunakan Skala Pengukuran Saaty (Saaty, 2008)

(a) Integritas				
Indikator	Kepemilikan KIP	Rata-rata Lama Belajar		
Kepemilikan KIP	1	1		
Rata-rata Lama Belajar	1	1		

(b) Etos Kerja				
Indikator	Rata-rata Jumlah Jam Kerja	Rata-rata Pendapatan	Dibantu buruh tidak tetap	Dibantu buruh tetap
Rata-rata Jumlah Jam Kerja	1	2	2	2
Rata-rata Pendapatan	1/2	1	1/3	1/3
Dibantu buruh tidak tetap	1/2	3	1	1/2
Dibantu buruh tetap	1/2	3	2	1

(c) Gotong Royong			
Indikator	% Desa terdapat perkelahian massal	% Penduduk mengikuti gotong royong	% Desa memiliki kebiasaan gotong royong
% Desa terdapat perkelahian massal	1	1/5	1/3
% Penduduk mengikuti gotong royong	5	1	4
% Desa memiliki kebiasaan gotong royong	3	1/4	1

Selanjutnya, pada Gambar 1 berikut ini disajikan Diagram alir penghitungan dan pemetaan nilai Indeks Revolusi Mental. Kegiatan diawali dengan pengumpulan data untuk setiap indikator pada masing-masing dimensi.



Gambar 1. Diagram alir penghitungan dan pemetaan nilai Indeks Revolusi Mental

5. Hasil dan Pembahasan

Menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) nilai-nilai untuk ketiga dimensi dari revolusi mental disajikan dalam Tabel 4. Sedangkan, ringkasan nilai statistik dari masing-masing dimensi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Nilai Dimensi Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong menurut provinsi

No	Provinsi	Integritas	Etos Kerja	Gotong Royong
1	Aceh	20,47%	51,21%	60,71%
2	Sumatera Utara	34,51%	44,47%	23,17%
3	Sumatera Barat	32,06%	61,88%	51,35%
4	Riau	23,69%	59,81%	50,09%
5	Jambi	20,83%	50,60%	61,19%
6	Sumatera Selatan	18,82%	48,66%	39,65%
7	Bengkulu	21,82%	49,10%	42,00%
8	Lampung	30,45%	54,43%	49,35%
9	Bangka-Belitung	33,82%	63,88%	36,50%
10	Kepulauan Riau	45,86%	60,62%	65,71%
11	DKI Jakarta	91,74%	78,72%	37,57%
12	Jawa Barat	49,05%	58,20%	56,53%
13	Jawa Tengah	42,56%	58,61%	67,14%
14	D I Yogyakarta	44,82%	53,85%	99,20%
15	Jawa Timur	50,18%	57,60%	54,58%
16	Banten	37,41%	52,59%	52,27%
17	Bali	55,02%	62,77%	69,00%
18	Nusa Tenggara Barat	19,36%	43,20%	63,40%
19	Nusa Tenggara Timur	21,92%	29,86%	57,16%
20	Kalimantan Barat	10,51%	51,16%	39,11%
21	Kalimantan Tengah	13,53%	53,06%	32,20%
22	Kalimantan Selatan	19,54%	51,22%	44,98%
23	Kalimantan Timur	32,46%	70,54%	44,19%
24	Kalimantan Utara	31,67%	73,63%	46,20%
25	Sulawesi Utara	39,77%	65,27%	75,61%
26	Sulawesi Tengah	15,87%	58,24%	60,49%
27	Sulawesi Selatan	23,60%	51,36%	34,04%
28	Sulawesi Tenggara	15,07%	48,92%	41,12%
29	Gorontalo	34,33%	62,95%	46,93%
30	Sulawesi Barat	11,81%	34,62%	46,54%
31	Maluku	37,01%	44,69%	71,45%
32	Maluku Utara	10,04%	49,48%	74,66%
33	Papua Barat	11,46%	49,16%	46,60%
34	Papua	22,80%	27,60%	36,29%

Tabel 5. Ringkasan nilai statistik untuk masing-masing dimensi revolusi mental

Dimensi	Rata-rata	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
Integritas	30,11%	16,30%	10,04%	91,74%
Etos Kerja	53,88%	10,82%	27,60%	78,72%
Gotong Royong	52,26%	15,16%	23,17%	99,20%

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa tidak ada satu pun provinsi yang dominan, dalam arti memiliki nilai tertinggi untuk setiap dimensi. Nilai tertinggi dan terendah untuk masing-masing dimensi bervariasi pada provinsi-provinsi di Indonesia. Hanya, DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi untuk dua dimensi yaitu Integritas dan Etos Kerja dengan nilai 91,47% dan 78,72%. Sedangkan, nilai tertinggi untuk dimensi Gotong Royong dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta, yakni sebesar 99,20%. Sedangkan, provinsi dengan nilai terendah untuk dimensi Integritas adalah Maluku Utara (10,04%); untuk dimensi etos kerja adalah Papua (27,60%); dan untuk dimensi Gotong Royong adalah Sumatera Utara (23,17%). Secara visual, nilai-nilai dari ketiga dimensi dari masing-masing provinsi yang sudah diurutkan berdasarkan nilai dari masing-masing dimensi dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai dengan 3.

Dari Tabel 5, nilai rata-rata untuk masing-masing dimensi adalah integritas (30,11%), etos kerja (53,88%), dan gotong royong (52,26%). Dari ketiga dimensi revolusi mental, terlihat bahwa secara rata-rata dimensi etos kerja memiliki nilai tertinggi dan dimensi integritas memiliki nilai terendah. Namun demikian, masih secara rata-rata, nilai ketiga dimensi ini masih jauh dari 100. Berdasarkan, hal ini maka seluruh dimensi revolusi mental perlu mendapatkan perhatian untuk lebih ditingkatkan, terutama dimensi integritas yang nilainya bisa dikatakan relatif rendah, yaitu kurang dari 50 persen.

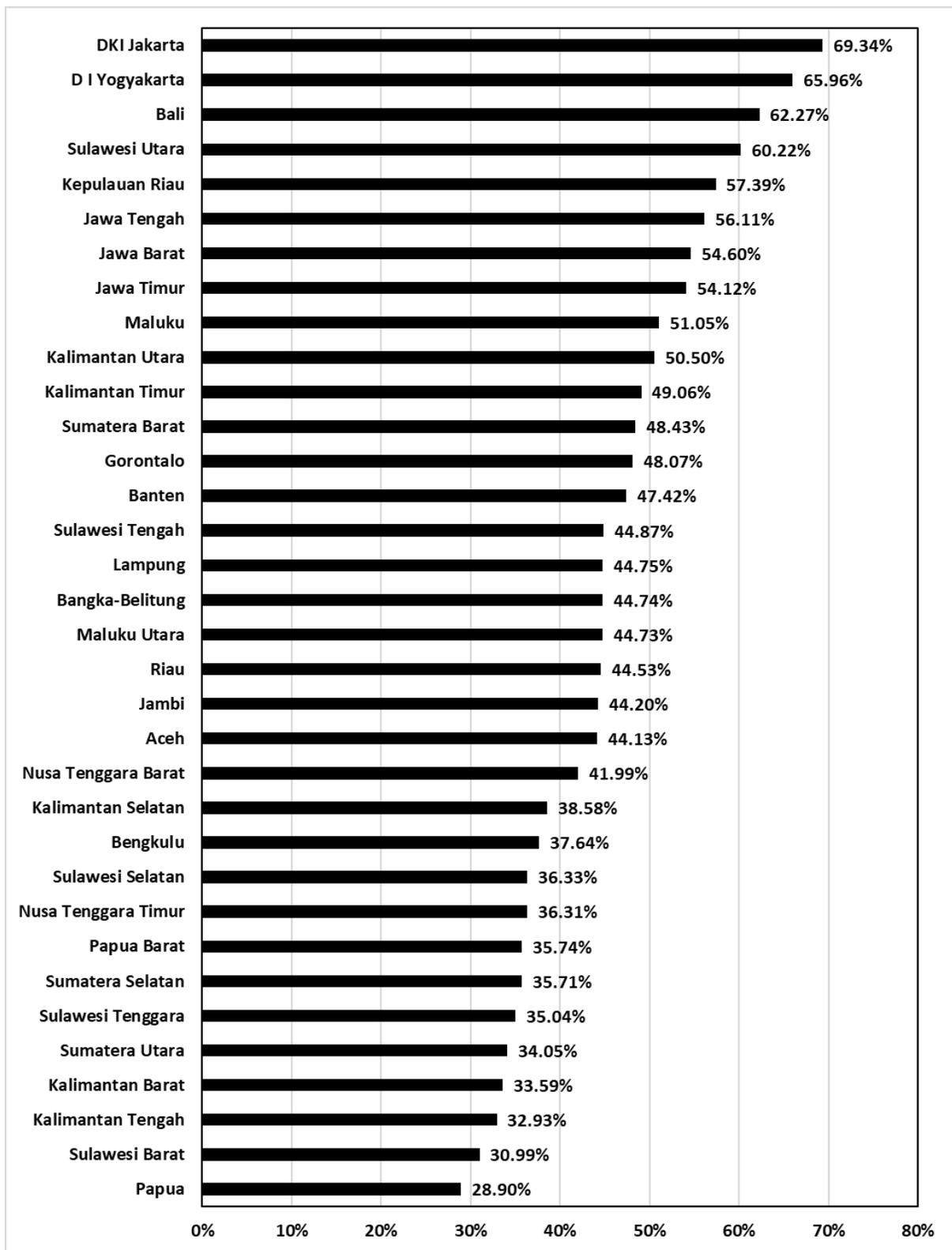
Di samping memiliki nilai rata-rata paling rendah, dimensi integritas juga memiliki nilai variasi terbesar, dapat dilihat dari nilai standar deviasinya. Hal ini berarti bahwa keragaman nilai integritas provinsi-provinsi di Indonesia sangat tinggi, artinya jarak antara provinsi dengan nilai integritas terendah dan tertinggi relatif jauh, buktinya dapat dilihat dari nilai minimum dan maksimum. Sedangkan, dimensi dengan keragaman terendah adalah etos kerja, hal ini dapat diartikan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia memiliki etos kerja yang tidak berbeda jauh.

Namun demikian, meskipun memiliki nilai rata-rata tertinggi, dimensi etos kerja bukanlah dimensi yang memiliki nilai maksimum tertinggi.

Selanjutnya, dimensi revolusi mental yang memiliki nilai maksimum tertinggi adalah gotong royong, yaitu 99,20 persen. Dengan nilai maksimum tertinggi, dimensi gotong royong ternyata juga memiliki nilai variasi yang mendekati nilai variasi dimensi integritas. Hal ini juga berarti bahwa keragaman tingkat gotong royong antara provinsi juga tinggi, dengan kata lain, ada provinsi-provinsi yang sangat tinggi pelaksanaan gotong royongnya dan ada provinsi-provinsi yang sifat kegotongroyongannya relatif rendah. Kondisi ini dapat dimaklumi, mengingat Indonesia sangatlah beragam dalam suku dan budaya. Ada suku-suku yang sangat menjunjung tinggi sifat gotong royong serta senantiasa melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin. Ini bukanlah berarti, bahwa ada suku yang tidak memiliki sifat gotong royong, akan tetapi, hanya frekuensinya saja yang relatif sedikit.

Namun demikian, mengingat bahwa gotong royong merupakan salah satu kearifan local dan ciri khas dari Bangsa Indonesia, maka sudah sepatutnya untuk dijaga dan dilestarikan. Gotong royong memiliki fungsi dan kekuatan besar dalam kehidupan dalam masyarakat, sebab gotong royong mengandung nilai kebersamaan, menghargai, kejujuran dan tenggang rasa. Namun disayangkan bahwa adanya perkembangan zaman dan perubahan globalisasi, membuat ciri khas ini banyak mengalami degradasi dan kehilangan makna tergantikan dengan sifat individualistik, materialistik serta penilaian dan penghargaan yang didasarkan pada materi. Kondisi ini harus diperbaiki, sehingga sudah sepatutnya kita mengembalikan nilai-nilai gotong royong dan keswadayaan masyarakat sebagai potensi pembangunan yang berbasis pada pengembangan kearifan lokal. Melalui gotong-royong, masyarakat dapat memperkuat sinergitas partisipasi dan keberdayaan masyarakat menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera.

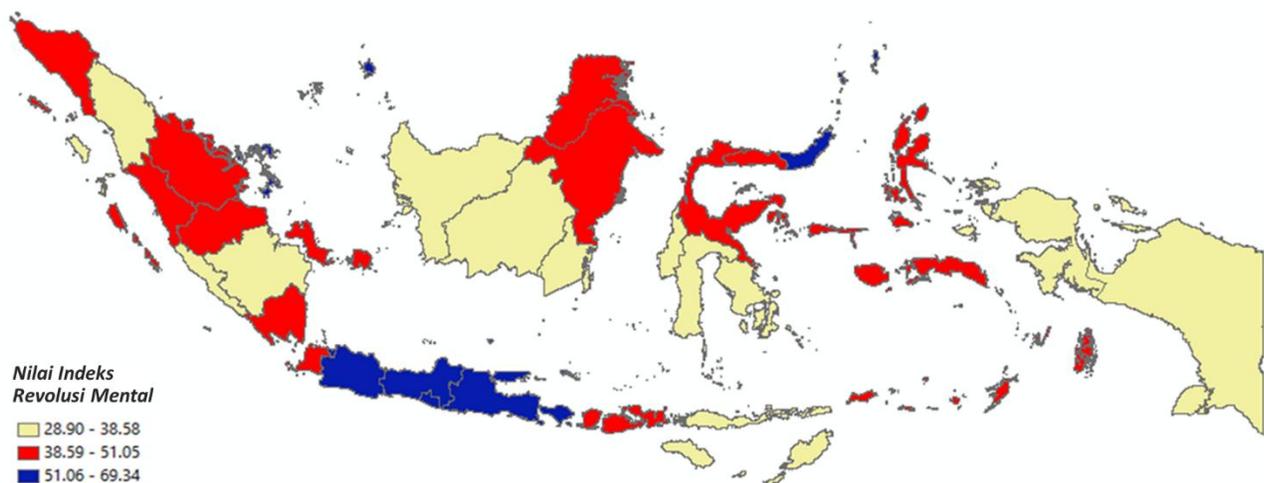
Kemudian, setelah nilai dari ketiga dimensi didapatkan, maka dengan menggunakan *equal weight*, dihitung nilai IRM-nya untuk setiap provinsi. Hasil dari penghitungan IRM dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai IRM tertinggi, yaitu sebesar 69,34 persen, diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali dengan nilai IRM masing-masing sebesar 65,95 persen dan 62,27 persen. Selanjutnya, provinsi dengan nilai IRM terendah adalah Papua dengan nilai 28,90 persen.



Gambar 2. Nilai Indeks Revolusi Mental menurut provinsi (%)

Untuk melengkapi visualisasi nilai IRM, utamanya untuk memudahkan identifikasi nilai IRM berdasarkan provinsi, Gambar 3 menyajikan peta nilai IRM menurut provinsi. Dari Gambar 3 terlihat bahwa hanya terdapat delapan provinsi yang memiliki nilai IRM di atas 51 persen. Dimana dari delapan provinsi tersebut, lima provinsi diantaranya berada di Pulau Jawa, dan hanya ada masing-masing satu provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Riau, Pulau Bali, dan Pulau Sulawesi, yakni Provinsi Sulawesi Utara. Dengan kata lain, hampir seluruh provinsi di luar Pulau Jawa memiliki nilai IRM di bawah 51 persen. Bahkan, di Pulau Papua, tidak satu pun provinsinya yang memiliki nilai IRM di atas 39 persen.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat lebih memprioritaskan provinsi-provinsi yang memiliki nilai IRM relatif rendah. Tentu saja, peningkatan nilai IRM dilakukan melalui peningkatan nilai dari dimensi IRM. Provinsi yang masih memiliki nilai indeks rendah untuk suatu dapat lebih membuat dan melaksanakan kebijakan yang memacu peningkatan indikator-indikator dari suatu dimensi yang masih rendah nilai indeksnya. Sedangkan, provinsi yang sudah memiliki nilai indeks relatif baik dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai-nilai yang memperkuat mental bangsa, melalui indikator-indikator dari setiap dimensi.



Gambar 3. Peta nilai Indeks Revolusi Mental menurut provinsi (%)

6. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada studi ini, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara rata-rata nilai IRM provinsi-provinsi di Indonesia masuk pada kategori relatif sedang, yaitu sekitar 45,42 persen, dengan nilai rata-rata dari dimensi adalah 30,11 persen untuk integritas, 53,88 persen untuk etos kerja, dan 52,26 persen untuk gotong royong.
2. Salah satu penyebab kurang tingginya nilai IRM tersebut adalah rendahnya nilai integritas yang secara rata-rata cuma sekitar 30,11 persen. Sedangkan, kedua dimensi yang lain, yakni dimensi etos kerja dan dimensi gotong royong memiliki nilai rata-rata yang sedikit lebih tinggi yaitu masing-masing sebesar 53,88 persen dan 52,26 persen.
3. Secara spasial, nilai IRM tertinggi hanya dimiliki oleh delapan provinsi, dimana lima diantaranya berada di Pulau Jawa. Mayoritas provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa memiliki nilai IRM yang masuk kategori sedang atau rendah, bahkan di Pulau Papua tidak satu pun provinsinya memiliki nilai IRM diatas 39 persen.

6.2. Saran

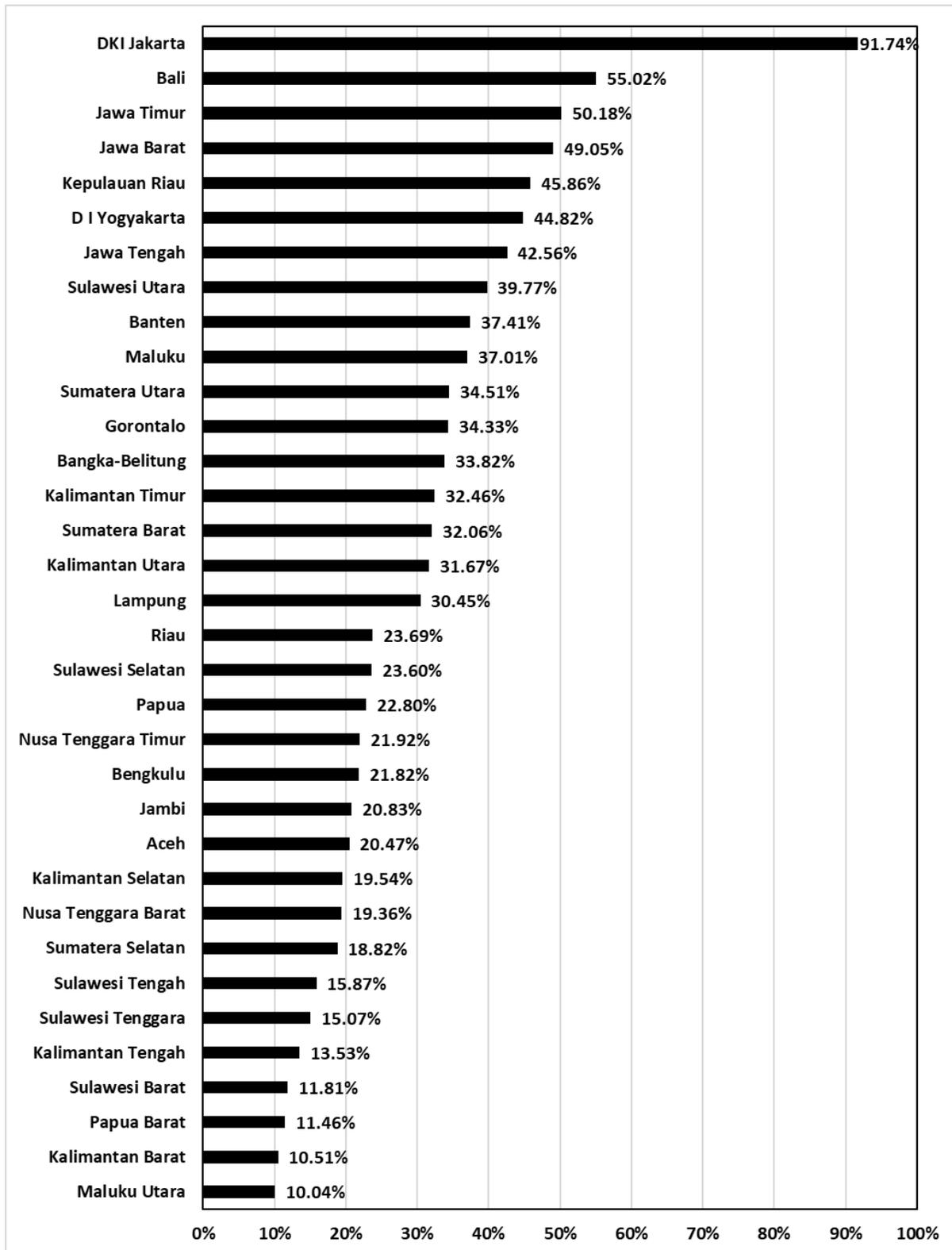
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, beberapa usulan saran untuk rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, disarankan untuk lebih memprioritaskan provinsi-provinsi yang memiliki nilai IRM relatif rendah, yaitu dengan cara meningkatkan nilai-nilai dari setiap indikator pada dimensi yang nilainya yang dianggap masih rendah. Misalnya di tiga provinsi dengan IRM terendah (Papua, Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah) pada dimensi integritas yaitu meningkatkan berbagai program dalam bidang pendidikan.
2. Untuk penelitian selanjutnya dalam mengukur tingkat revolusi mental perlu upaya mengkaji lebih jauh ketersediaan indikator-indikator lain pada kementrian lain pada

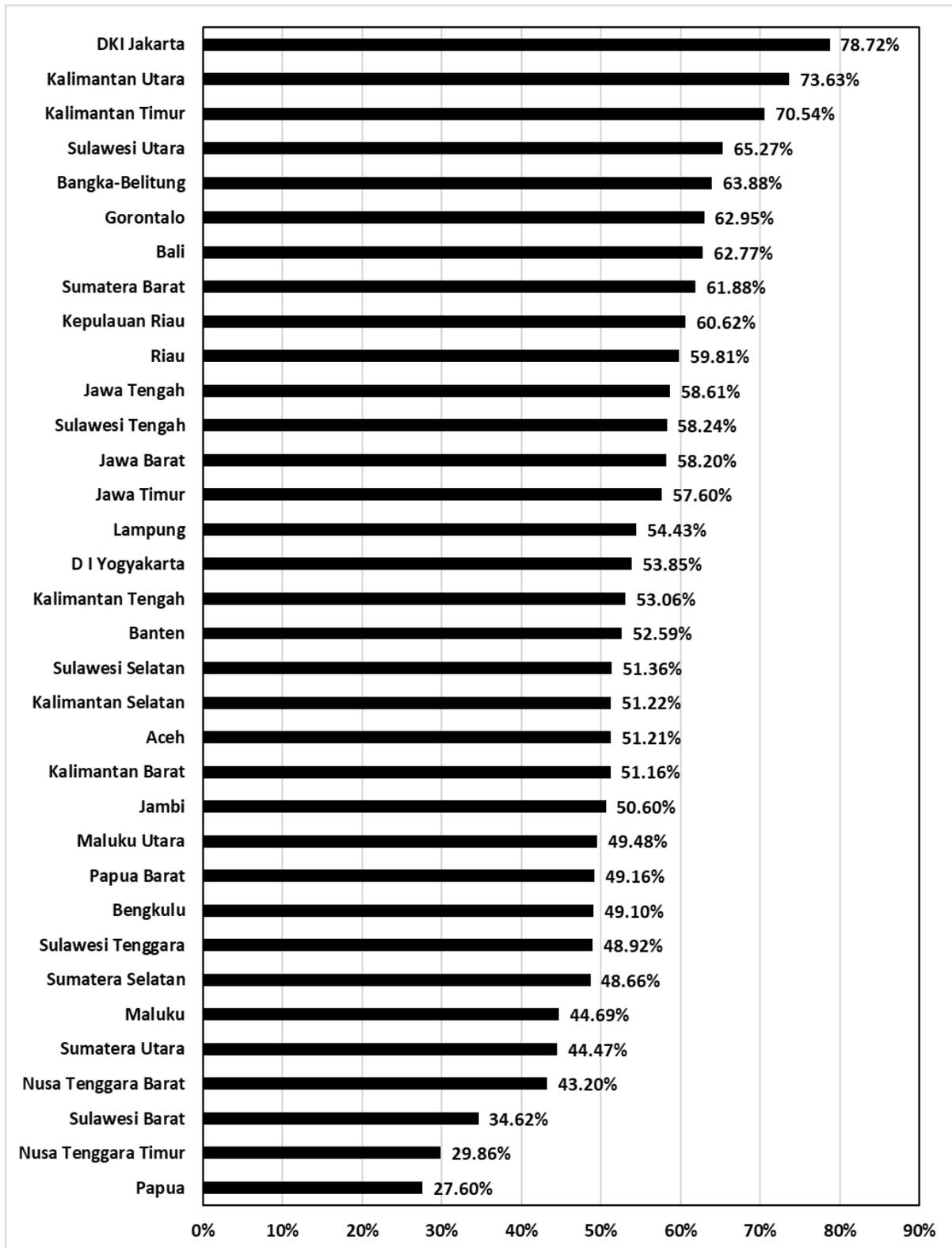
dimensi integritas, etos kerja dan gotong royong dan dalam pembentukan *pair wise comparison matrix* perlu melibatkan expert judgement. Kedua upaya ini diyakini dapat memberikan hasil IRM yang lebih tepat dan komprehensif.

Daftar Pustaka

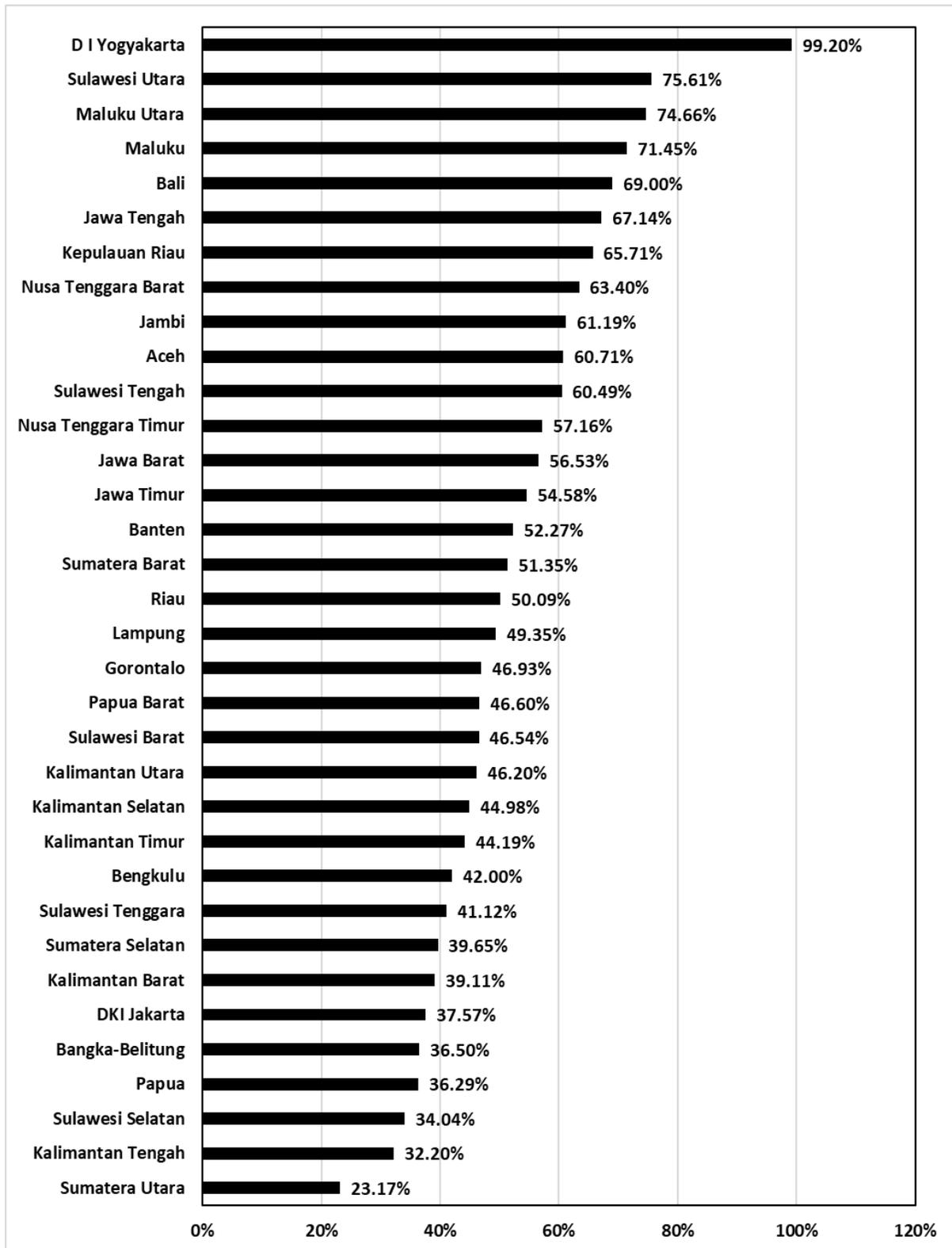
- Chakraborty, A. & Joshi, P.K. (2016). Mapping Disaster Vulnerability in India using Analytical Hierarchy Process. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, Vol. 7 (1), hal. 308-325.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- Saati, T.L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. *International Journal Services Sciences*, Vol. 1 (1), hal. 83-98.
- Stern, S., Wares Amy, & Epner Tamar. 2017. The Social Progress Index Methodology 2017. *Social Progress Imperative*.
- Transparency International Indonesia. 2015. Indeks Persepsi Korupsi 2015



Gambar A. Nilai Indeks Dimensi Integritas menurut provinsi (%)



Gambar B. Nilai Indeks Dimensi Etos Kerja menurut provinsi (%)



Gambar C. Nilai Indeks Dimensi Gotong Royong menurut provinsi (%)